

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan kepada kedaulatan rakyat. Hal ini berarti bahwa dalam setiap pembuatan keputusan/ kebijakan harus berdasarkan kepada kepentingan rakyat. Negara tidak bisa sewenang-wenang dalam membuat dan menjalankan suatu kebijakan. Demokrasi sering juga diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi memiliki kaitan yang erat dan sistematis dengan partai politik dan juga pada pemilu (Pemilu). Pada umumnya partai politik itu dapat dikatakan sebagai suatu kelompok manusia yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berusaha untuk merebut kedudukan politik (biasanya dengan melalui cara konstitusional) melalui program-programnya.

Partai politik merupakan suatu hal yang sangat berperan penting dalam proses menuju suatu pemerintahan yang demokrasi dan juga perpolitikan dalam suatu berbagai negara-negara demokrasi. Partai politik itu merupakan suatu cara untuk mengejar suatu tujuan yang digunakan oleh stiap individu melalui suatu lembaga atau organisasi tertentu untuk memperoleh suatu kekuasaan politik dengan cara bersaing melalui pemilihan umum (pemilu).

Pemilu merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan demokrasi. Karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, maka diperlukan cara untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Secara umum, Pemilihan umum adalah cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk didalam suatu badan-badan perwakilan rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat.

Menurut teori demokrasi minimalis sebagaimana yang dijelaskan oleh Schumpeter (Dalam Sitepu 2012:177) “Pemilihan umum merupakan sebuah arena yang memadahi kompetensi antara aktor-aktor yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.

Dalam hubungan ini, partai politik merupakan aktor utama yang berkompetensi untuk memperoleh dukungan massa dan meraih kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam menjalankan fungsi kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh setiap kelompok dalam lembaga atau organisasi yang disebut sebagai partai politik itu memiliki berbagai visi, misi dan tugas serta fungsi tertentu yang berbeda pada tiap kelompok individu tersebut sesuai dengan partai politiknya masing-masing.

Disamping itu Menurut Gunawan (2008:8) “Partai politik yang berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dimana dalam proses pengisian jabatan politik

melalui mekanisme demokrasi. Rekrutmen politik tersebut antara lain untuk menjadi bakal calon anggota Legislatif maupun anggota Eksekutif’.

Bila mengkaji dari perjalanan sejarah sejak diadakannya pemilu di Indonesia pada tahun 1955 dalam proses pelaksanaan fungsi partai politik terjadi ketidak seimbangan di mana hal ini dapat sering terlihat di dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi dimasyarakat. Banyak partai politik yang berperan aktif dan semata-mata terlihat kekuasaannya hanya pada saat menjelang pelaksanaan pemilu saja pada masyarakat. Seperti halnya diatas dimana partai politik itu bertujuan dalam hal mengejar suatu kedaulatan atau kekuasaan didalam suatu lembaga-lembaga di suatu pemerintahan itu.

Dari berbagai partai politik yang dulunya pada masa orde baru hanya ada terdapat tiga partai yang dikenal yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan golongan karya (GOLKAR). Tapi sejak berubah ke jaman orde reformasi pertumbuhan partai politik itu makin banyak dikenal dan sampai sekarang ini juga. Dengan pertumbuhan partai politik tersebut maka mengakibatkan banyak berbagai janji yang hanya sebatas janji pada masyarakat sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan pada pelaksanaan fungsi partai politik. Banyaknya partai politik mengakibatkan melaksanakan berbagai cara dalam memenangkan suatu demokrasi. Pelaksanaan partai politik yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan politik kotor yang dilaksanakan oleh berbagai partai politik dalam mengejar suatu kekuasaan seperti halnya didalam pelaksanaan pemilu legislatif yang sudah sering terlihat yaitu sebagai contoh politik uang.

Politik uang nampaknya sudah menjadi *‘the rules of the game’* (aturan main) pemilu 2014 yang jauh lebih buruk dengan pemilu-pemilu sebelumnya. seperti terlihat dari berbagai kecurangan para anggota-anggota legislatif dari berbagai daerah masing-masing yang mengejar kekuasaan dengan menggunakan politik uang dalam perolehan suara. Memang tidak semua uang yang digunakan dalam kegiatan pemilu termasuk dalam kategori politik uang, yang dikonotasikan publik sebagai uang haram. Politik uang ditujukan kepada penyalahgunaan keuangan publik/negara untuk keuntungan kepentingan politik tertentu, atau penggunaan dana secara melawan hukum untuk mencapai kemenangan, baik berwujud upaya pembujukan, paksaan maupun mempengaruhi pilihan secara tidak langsung.

Peneliti ICW Donal Fariz dalam konferensi pers Temuan Pemantauan Politik Uang di Jakarta (21/4) pemantauan di 15 provinsi menggambarkan masih maraknya pelanggaran politik uang dalam Pemilu Legislatif 2014. Jumlahnya naik dua kali lipat dibandingkan Pemilu Legislatif 2009. Berdasarkan wilayah pemantauan, Banten menduduki urutan pertama dengan 36 pelanggaran politik uang. Riau dan Bengkulu menyusul dengan jumlah yang sama, yaitu 33 kasus, diikuti Sumatera Barat dengan 30 kasus, dan Sumatera Utara dengan 29 kasus.

Pemantauan dilakukan sejak 16 Maret 2014 terhitung sejak kampanye terbuka hingga hari pencoblosan 9 April 2014. Dari 313 kasus yang berhasil ditemukan, pemberian uang menempati posisi pertama dengan 104 kasus. Menyusul pemberian barang sebanyak 128 kasus, pemberian jasa 27 kasus, dan penggunaan sumber daya negara sebanyak 54 kasus. Berdasarkan besaran jumlah

uang, terdapat 28 kasus dengan nilai Rp 26 ribu hingga Rp 50 ribu dan masih banyak calon legislatif yang memberi duit dengan besaran antara Rp 5 ribu hingga Rp 25 ribu. Besaran duit ini menempati urutan kedua dengan jumlah 24 kasus. Aspek kondisi ekonomi masyarakat turut berpengaruh. Semakin rendah kondisi ekonomi masyarakat, semakin rendah biaya politik yang digelontorkan untuk membeli suara.

Kepastian terhadap terlaksananya prinsip jujur dan adil dalam pemilu masih menjadi persoalan bersama dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014. Pandangan masyarakat terhadap partai politik yang dibuktikan dengan semakin berkurangnya partisipasi pemilih dalam pemilu 2014 bukan tanpa alasan, karena memang sampai hari ini belum nampak hasil kerja nyata partai politik yang benar-benar berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya setelah pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pastinya politik uang telah merusak moral bangsa dan ternyata reformasi yang membawa negeri ini kembali era demokrasi konstitusional tampaknya bukan membawa ke alam demokrasi sejati, akan tetapi justru negeri ini semakin terperosok kedalam demokrasi transaksional yang makin buruk. Kualitas demokrasi kian merosot saat yang berkembang adalah *pragmatisme-transaksional* yang sarat dengan politik uang dalam praktik demokrasi politik.

Sudah selayaknya setiap masyarakat Indonesia diberikan dan diperkenalkan suatu pendidikan politik dan partai politik yaitu dengan pelaksanaan fungsi partai politik pada sosialisasi politik. Tetapi semua itu jauh yang diharapkan karena pelaksanaan fungsi itu tidak dapat ditemukan didalam masyarakat.

Mahasiswa jurusan PP-Kn pada saat memasuki semester 1 sudah mendapatkan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik, yang membahas mengenai pemerintahan, kebijakan publik dan juga partai politik. Politik yang merupakan ilmu pemerintahan jadi Mahasiswa PP-Kn seharusnya dapat berpikir kritis di dalam menilai bagaimana pelaksanaan fungsi partai politik di dalam masyarakat maupun negara. Sudah seharusnya mahasiswa PP-Kn dapat mengkaji, melihat dan mengetahui apa-apa saja yang menjadi fungsi partai politik itu dan kenyataannya di dalam pelaksanaan fungsinya di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan penulis, masih banyak mahasiswa jurusan PP-kn yang kurang memahami fungsi dari partai politik dan juga memiliki pandangan yang berbeda-beda di dalam pelaksanaan fungsi partai politik itu. Sementara bila dilihat pada saat ini pertumbuhan partai politik itu yang semakin banyak jumlahnya yang mempunyai tujuan, visi dan misi yang berbeda di dalam memajukan partainya dalam menarik perhatian masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan pendidikan politik itu sudah seharusnya dilaksanakan sejak dini agar lebih memahami bagaimana proses perkembangan politik itu di dalam masyarakat karena politik itu yang sangat berpengaruh besar didalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pada pengamatan penulis, pada pelaksanaan fungsi partai politik juga banyak di teliti oleh berbagai mahasiswa lain, tetapi pada penelitian mereka lebih mengacu pada peranan serta fungsi partai politik itu sendiri dan juga kemajuan dalam suatu partai politik itu sendiri di dalam mempublikasikan partai di dalam masyarakat. Adapun beberapa karya ilmiah mahasiswa pada partai politik itu

seperti Fungsi Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan Uu No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Oleh Arian Rangga Andika, Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Oleh George Towal Igbal, Pola Rekrutmen Partai Politik Oleh Wengki Saputra dan Peran Partai Politik Dalam Sistem Multi Partai Terhadap Hasil Pemilukada Di Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Oleh Lan Lan Risdiana.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji penelitian pada pelaksanaan fungsi partai politik pada pemilu legislatif dimana seperti yang telah dijelaskan diatas pada proses perkembangan partai politik itu yang semakin berkembang tanpa pernah melihat bagaimana tujuan serta fungsinya di dalam kehidupan masyarakat. Hal yang paling menarik penulis mengambil topik pada fungsi partai politik pada pemilu legislatif dimana pada pada tahun 2014 ini merupakan suatu pesta demokrasi rakyat dalam pelaksanaan pemilu legislatif. Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih bagaimana proses pelaksanaan partai politik pada pesta demokrasi ini yang terlihat dari berbagai proses perkembangannya dan pelaksanaannya dari masa kemas tidak sesuai dengan tujuan serta fungsinya di dalam kehidupan suatu negara Indonesia dimana semata-mata partai politik itu hanya untuk mempublikasikan partainya dalam mempertahankan populasi partai politiknya.

Hal inilah yang mendorong dan menyebabkan penulis ingin mengetahui lebih banyak lagi bagaimana proses serta pandangan ataupun persepsi mahasiswa jurusan PP-Kn tentang pelaksanaan fungsi partai politik bila dilihat dari fenomena dan realita yang terjadi pada saat ini.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti hal tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul : **“Persepsi Mahasiswa Tentang Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan PP-Kn Angkatan 2011 Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Darma Agung Medan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Persepsi mahasiswa Jurusan PP-Kn Angkatan 2011 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darma Agung Medan tentang pelaksanaan fungsi partai politik pada pemilu legislatif 2014.
2. Faktor-faktor yang mendukung mahasiswa Jurusan PP-Kn Angkatan 2011 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darma Agung Medan dalam memahami fungsi partai politik dalam pemilu legislatif 2014.
3. Pemahaman mahasiswa Jurusan PP-Kn Angkatan 2011 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darma Agung Medan terhadap fungsi partai politik yang ada di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas, maka permasalahan perlu dibatasi. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada persepsi mahasiswa Jurusan PP-Kn Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Univeristas Darma Agung Medan tentang pelaksanaan fungsi partai politik pada pemilu legislatif.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana persepsi mahasiswa Jurusan PP-Kn Angkatan 2011 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas Darma Agung Medan tentang pelaksanaan fungsi partai politik dalam pemilu legislatif 2014?

E. Tujuan penelitian

Tujuan merupakan suatu tolak/acuan untuk mencapai suatu permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikia yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa Jurusan PP-Kn Angkatan 2011 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas Darma Agung Medan tentang pelaksanaan fungsi partai politik dalam pemilu legislatif 2014.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penulis selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.
2. Sebagai informasi dan bahan masukan kepada partai politik untuk dapat melaksanakan fungsinya lebih baik lagi
3. Bagi mahasiswa dan para pembaca adalah sebagai tambahan pengetahuan untuk meningkatkan wawasan para pembaca. Selain itu sebagai referensi

untuk para mahasiswa yang ingin membahas masalah tentang pajak parkir yang memiliki studi kasus yang berbeda.

4. Dan bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian dimasa yang akan datang tentang permasalahan yang sama.